



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi pendapatan yang tidak merata merupakan problematika ekonomi yang kerap kali mencuat di negara-negara dunia, termasuk Indonesia. Bagi masyarakat muslim Allah telah mensyariatkan salah satu penyelesaian yang jika dikelola dengan baik akan dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan, yaitu ZIS (Zakat, Infak, dan Shadaqah). Zakat bersifat wajib apabila telah mencapai nisabnya, sedangkan infak dan shadaqah merupakan pengeluaran harta secara sukarela.

Kedudukan kewajiban zakat dalam islam sangat mendasar dan fundamental. Begitu mendasarnya sehingga dalam Al-qur'an sering kali kata zakat dipakai bersamaan dengan kata shalat, yang menegaskan adanya kaitan komplementer antara ibadah shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertical ketuhanan perintah zakat dalam Al-quran sering disertai dengan ancaman yang tegas. Zakat merupakan institusi resmi yang diarahkn untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Islam sebagai rahmatan lil alamin telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi manusia. Zakat sebagai salah satu kewajiban umat islam dapat berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapat (Buhari,2012).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai perwujudan ketaatan kepada Allah, tetapi juga merupakan perwujudan kepedulian kepada sesama manusia. Dengan kata lain, berbeda dari kewajiban shalat yang lebih menekankan pada *hablumminallah*, zakat lebih bercorak sosial ekonomi yang bertujuan untuk mempererat *hablumminannas* yang juga berarti perwujudan konkrit dari hubungan manusia yang positif.. Dana zakat diambil dari harta umat muslim yang telah mencapai nisab (muzakki) untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya.

Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-taubah ayat 103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Yang artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S.At-Taubah: 103).

Untuk mengakomodasi pengelolaan zakat tersebut, setiap pemerintah islam perlu mendirikan kantor, yayasan atau lembaga khusus untuk mengurus pengumpulan serta pembagian zakat sesuai dengan perintah Allah Swt. Sejalan dengan kebutuhan ini, pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam UU RI No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan KMA (Keputusan Menteri Agama) No.581 tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No.38 tahun 1999. Dalam Bab III

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

UU No.38 tersebut dikemukakan bahwa ada dua jenis organisasi pengelola zakat, yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah (pasal 6) dan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat (pasal 7).

Fenomena boomingnya industri keuangan syariah, hingga terbitnya UU pengelolaan zakat telah berhasil mendorong pengembangan lembaga amil zakat (LAZ) ke arah lebih profesional, transparan, akuntabel, dan terkoordinasi. Meskipun masih ada kekurangan di sana-sini yang perlu dievaluasi lagi, tetapi sejauh ini sudah berjalan dengan baik bila dibandingkan di era sebelum reformasi. Tinggal bagaimana BASNAZ sebagai badan tertinggi pengelolaan zakat tingkat nasional mampu memaksimalkan perannya sebagai bagian dari amanat UU untuk menjalankan fungsi koordinatif, konsultatif, dan informatif bagi stake-holders zakat tanah air (Karim, Syarif, 2009)

Organisasi pengelola zakat di Indonesia antara lain adalah BASNAZ (Badan Amil Zakat Nasional) serta Baitul Mal. Zakat sebagai suatu kekuatan actual umat Islam perlu dikelola dengan suatu sistem manajemen seperti yang digunakan dalam bidang perekonomian masyarakat lainnya. Informasi menjadi inti dari kegiatan perzakatan. Agar informasi yang dibutuhkan tersedia, maka zakat harus diserahkan kepada pemegang pembukuan yang menulis semua transaksi perzakatan (Muhammad, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan Budaya UIN Jakarta tahun 2003-2004 yang meneliti potensi dan sosial umat Islam. Dari riset terhadap 1500 keluarga muslim yang dipilih secara acak (*probability sampling*) dan 300 organisasi filantropi (LAZIZ, BAZIS, dan kepanitiaan masjid) yang seluruh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampelnya dipilih dengan metode purposive (*non probability sampling*). Mencatat bahwa potensi dana umat dari sektor zakat, infak, dan sedekah dapat digali mencapai Rp19,3 triliun per tahun. Angka ini diperoleh dari rata-rata sumbangan keluarga muslim per tahun sebesar Rp 409.267 dalam bentuk tunai dan Rp148.200 dalam bentuk barang. Jika jumlah rata-rata sumbangan dikalikan dengan jumlah keluarga muslim, sebesar 34,5 juta (data BPS tahun 2000), maka total dana yang dapat dikumpulkan Rp14,2 triliun. Sementara total sumbangan dalam bentuk barang sebesar Rp5,1triliun.(Utomo,2012).

Dari data tersebut terlihat bahwa potensi zakat, infak, sadaqah di Indonesia sangat besar jika dikelola dengan baik, karena masyarakat Indonesia mayoritas adalah beragama islam dan dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang semakin maju yang ditunjang akses penerimaan informasi semakin mutakhir dapat menumbuhkan kesadaran bagi kaum muslim kaya sebagai muzzaki (pemberi zakat) untuk menyalurkan sebagian hartanya kepada kaum papah (*mustahik*).

Pada kenyataannya Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi zakat bagi kesejahteraan umat. Pengelolaan zakat yang menempatkan kejujuran dan amanah sebagai asas utama pelaksanaannya menimbulkan kekhawatiran dikalangan para *muzzaki*. Kepercayaan *muzzaki* kepada lembaga amil zakat masih rendah yang mana terdapat indikasi kekhawatiran dari masyarakat bahwa zakat yang diserahkan tidak sampai kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*).

Faktor ketidakpercayaan muzzaki pada pengelolaan dana zakat pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia dikarenakan kurangnya transparansi pada laporan keuangan dan akuntabilitas dari pihak OPZ, serta tidak

mendapatkan manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui OPZ (LAZ/BAZ) dibandingkan dengan penyaluran secara langsung.

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana. Manajemen zakat membutuhkan dukungan politik (*political will*) dari *umara* (pemerintah). Selain itu manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan efektif dan efisien. (mahmudi, 2008).

Saat ini pemerintah telah menyalurkan UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat serta Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. (Hafiduddin, 2002:126).

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelola zakat. Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga amul Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.

Posisi amilin (pengelola zakat) yang diformulasikan dalam bentuk LAZ dan BAZ merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu *public trust* (kepercayaan publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Utomo, 2012). Untuk itu diperlukan suatu standar dalam perlakuan akuntansinya

untuk dijadikan patokan dalam pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan kaidah syariah.

Oleh karena itu, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak dan sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal 6 april 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat islam dan untuk meningkatkan keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BAZ di Indonesia. Sekaligus untuk memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/ good governance yang meliputi *transparency, responsibility, accountability, fairness*, dan *indepency* (Utomo, 2007:14).

Dalam ajaran islam, kelima prisip-prinsip pokok GCG diatas sesuai dengan norma dan nilai islami dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangat intens mengajarkan diterapkannya prinsip adalah keadilan, *tawazun* (keseimbangan). *Mas'uliyah* (akuntabilitas), *akhlaq* (moral), *shiddiq* (kejujuran), *amanah* (pemenuhan kepercayaan), *fathanah* (kecerdasan), *tabligh* (transparansi, keterbukaan), *hurriyah* (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), *ihsan* (profesional), *wasathan* (kewajaran), *ghirah* (militansi syariah), *idarah* (pengelolaan), *khilafah* (kepemimpinan), *aqidah* (keimanan), *ijabiyah* (berfikir positif), *raqabah* (pengawasan), qira'ah dan *ishlah* (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan) (Yusuf Qaradhawi, 2005).

Adapun akuntansi zakat terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengendalian manajemen, dan akuntabilitas. Akuntansi zakat merupakan alat informasi antara lembaga pengelola zakat sebagai manajemen

dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Bagi manajemen informasi akuntansi zakat digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan, pembuatan program, alokasi anggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

Informasi akuntansi bermanfaat untuk pengambilan keputusan, terutama untuk membantu manajer dalam melakukan alokasi zakat. Selain itu, informasi akuntansi dapat digunakan untuk membantu dalam pemilihan program yang efektif dan tepat sasaran. Pemilihan program yang tepat sasaran, efektif, dan ekonomis akan sangat membantu dalam proses alokasi dana zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf yang diterima.

Salah satu Badan Amil Zakat yang berperan dalam pengelolaan dana zakat secara profesional adalah Badan amil Zakat Inhil. Badan Amil Zakat Inhil merupakan lembaga yang mendapatkan tanggung jawab (amanah) dari para muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dana yang telah terhimpun harus dicatat dengan akuntansi yang benar agar dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kebutuhan informasi akuntansi saat ini. akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, SDM pada badan pengelola masih banyak yang belum memahami dan kurang mendalami konsep-konsep dasar akuntansi sehingga Badan Amil Zakat Inhil belum menerapkan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan UU Zakat No 23 tahun 2011 bagian keliima pasal 29 ayat 1, bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak/sedekah dan sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi dan pemerintah daerah secara berkala. Laporan tahunan terdiri dari laporan keuangan (Neraca, Laporan sumber dan penggunaan dana, Laporan arus kas, Catatan atas laporan keuangan). Dan setelah peneliti melakukan wawancara, ada beberapa masalah yang terjadi di BAZ Inhil diantaranya:

Pertama, dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan akuntansi keuangan yang dibuat BAZNAS Inhil adalah laporan sumber dan penggunaan dana, pada saat ini laporan keuangannya belum menggunakan neraca. Sedangkan laporan keuangan menurut PSAK 109 menggunakan lima laporan keuangan yaitu: laporan neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Kedua, berdasarkan informasi dari wawancara penulis dengan sekretaris BAZNAS Inhil bahwa dalam pencatatan transaksi atas penerimaan dan penyaluran zakat BAZNAS Inhil tidak melakukan pencatatan jurnal, melainkan hanya berupa pencatatan dalam buku kas umum saja. Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 109 tentang akuntansi zakat paragraf 16 “zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurangan dana zakat sebesar (a) jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas, dan (b) jumlah tercatat jika dalam bentuk aset nonkas”.

Dr. Dana Zakat-nonamil xxx

Cr. Kas-dana zakat xxx

Dana zakat berkurang sebelah debet, dan kas berkurang sebelah kredit. Dari pengamatan sekilas, BAZ Inhil belum melakukan pengelolaan dan pelaporan dana

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

zakat dengan baik, pencatatan dan pelaporan yang diterapkan oleh BAZNAS Inhil belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 109.

Ketiga, Sumber Daya Manusia (SDM) pada badan pengelola masih banyak yang belum memahami dan kurang mendalami konsep-konsep dasar akuntansi dikarenakan pengurus/pengelola yang bekerja disana berasal dari konsentrasi atau keahlian yang berbeda sehingga Badan Amil Zakat Inhil belum sepenuhnya menerapkan PSAK 109 pada penyusunan laporan keuangannya.

Keempat, Badan Amil Zakat Inhil belum ada diaudit oleh akuntan publik. Seharusnya lembaga zakat harus menggunakan pembukuan yang benar dan diaudit karena audit adalah salah satu hal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dan untuk mengetahui apakah ada kecurangan atau tidak sehingga pengeluaran dana yang dilakukan dapat dipertanggung jawabkan baik kepada umat maupun kepada Allah Swt.

Kelima, tidak tersedianya situs/ web untuk mengakses informasi tentang BAZ Inhil sehingga masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui informasi, fungsi, atau program-program tentang BAZ itu sendiri, baik masyarakat sekitar maupun yang jauh dari kota atau didesa-desa sekitar Inhil itu sendiri. Sehingga mengakibatkan banyaknya masyarakat yang masih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung daripada melalui lembaga resmi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap penerapan akuntansi zakat, infak/sedekah pada BAZNAS Inhil karena dengan adanya penerapan akuntansi zakat secara baik dan benar akan mewujudkan pengelolaan zakat, infak/sedekah secara optimal dan

profesional pada BAZNAS Inhil, dengan judul “ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian yaitu,

Bagaimana perlakuan akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada Badan Amil Zakat Inhil dan apakah telah sesuai dengan PSAK No.109?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah :

Untuk menganalisa bagaimana perlakuan akuntansi zakat, infak dan sedekah pada Badan Amil Zakat Inhil, apakah sudah sesuai dengan PSAK 109.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dihapakan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Organisasi Pengelola Zakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan dalam penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah secara benar dan tepat didalam penyusunan laporan keuangan pada organisasi pengelolaan zakat, khususnya pada Badan Amil Zakat Inhil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dan bahan perbandingan bagi peneliti selanjutnya pada masa yang akan datang khususnya bagi yang membahas topik yang sama.

3. Bagi Peneliti

Sebagai aplikasi dan tambahan ilmu pengetahuan dari teori yang telah dipelajari didalam perkuliahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari beberapa bab atau bagian yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas tentang konsep dasar zakat, dasar kewajiban membayar zakat, konsep akuntansi zakat, infak/sedekah serta perlakuan akuntansi zakat, infak/sedekah, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan berisi tentang desain penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM BAZNAS

Bab ini berisi tentang profil BAZNAS Kab.Inhil, visi dan misi, tujuan pengelolaan zakat, program kerja BAZNAS, fungsi dan tugas pokok BAZNAS, serta susunan pengurus BAZNAS Kab.Inhil.

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil analisis data dan pembahasan. Pada bab ini data-data yang dikumpulkan, dianalisis dengan menggunakan alat analisis yang disiapkan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bagian penting yang akan berisi tentang kesimpulan dari analisis data dan pembahasan. Selain itu juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu serta mengungkapkan keterbatasan penelitian ini.